

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga Listrikan.
- (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (5) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- (6) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- (7) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang pendaftaran Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai.
- (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.
- (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Batang Milik Negara / Daerah.

- (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
- (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.
- (13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.
- (14) Intruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/IN/M/1998 tentang Pengaman Tanah-tanah Negara dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
- (15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 Tentang Leger Jalan.
- (16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
- (17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

- (20) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelekasanaan Kontruksi (Pemborongan).
- (21) Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor :02/KPTS/Db/1987 tentang Pedoman Penyiapan Gambar Terlaksana Jalan (As-Built Drawing)
- (22) Direktoral Jenderal Bina Marga, Pedoman Pengukuran Topografi untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan.
- (23) Direktoral Jenderal Bina Marga, Panduan Survai Jalan berdasarkan IRMS (Integrated Road Management Syistem)
- (24) Direktoral Jenderal Bina Marga, Panduan Survai Jembatan berdasarkan BMS (Bridge Management Syistem).